



Implementasi Model Penta Helix dalam Perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi

Fajar Miftakhul Rizqy¹ Diaz Anthera² Isa Elfianto³

¹²³Program Studi S-1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.2, Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta.
fajarmiftakhul95@gmail.com diazsantara@gmail.com isa.elfianto@gmail.com

Received : Nov 8, 2022; Accepted : March 29, 2023

DOI 10.25299/jiap.2023.vol9(1).8029

Abstract

Program planning is an important first step to develop community empowerment program. The penta helix becomes one of strategies to develop sustainable program of community empowerment. The penta helix model builds a collaborative network of multi-actor roles, including: Academics, Business Sector, Community, Government, and Media. The collaboration can be seen in the planning process of Technology-Based-Fish-Catching Improvement Program initiated by Corporate Social Responsibility PT Pertamina Refinery Unit II Dumai. This study aims to see how the process of the following program, including the role of each stakeholder. The method of this research used descriptive qualitative. The results of this study showed that each stakeholder has their own role in the planning process. There were 7 steps that have been passed during the process, such as; 1) Consideration of program recommendations from academics and proposals submitted by the community (groups); 2) Discussion of CSR Internal Team phase 1; 3) Assessment of the target group; 4) Discussion of CSR Team phase 2; 5) Draft of the initial program scheme by the CSR Team; 6) Involvement of external stakeholder in strengthening program planning; and 7) Formulation of program.

Key Words : *Community Development, Corporate Social Responsibility, Penta Helix, Program Planning*

Abstrak

Perencanaan menjadi langkah awal yang penting untuk membangun program pemberdayaan masyarakat. Model *penta helix* menjadi salah satu strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Model *penta helix* membangun jaringan kolaborasi peran multiaktor, di antaranya: Akademisi, Sektor Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. Kolaborasi tersebut tampak pada proses perencanaan Program Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi yang diprakarsai CSR PT Pertamina RU II Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan program yang dilalui dan peranan masing-masing *stakeholder* di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan setiap *stakeholder* memiliki peranan masing-masing di proses perencanaan. Terdapat 7 tahapan yang dilalui dalam proses perencanaan, di antaranya: 1) Pertimbangan rekomendasi program dari akademisi dan proposal yang diajukan oleh masyarakat (kelompok); 2) Diskusi Tim CSR tahap 1; 3) Asesmen terhadap kelompok sasaran; 4) Diskusi Tim CSR tahap 2; 5) Pembuatan skema awal program oleh Tim CSR; 6) Pelibatan *stakeholder* eksternal dalam penguatan perencanaan program; dan 7) Perumusan program.

Key Words : *Corporate Social Responsibility, Pengembangan Masyarakat, Penta Helix, Perencanaan Program*

Pendahuluan

Kota Dumai merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di ujung Provinsi Riau. Secara geografis, Kota Dumai berbatasan langsung dengan Selat Rupat di sebelah utara. Kota Dumai memiliki 53 sungai yang mengalir ke laut. Sungai-sungai tersebut biasa dilewati kapal-kapal berkapasitas kecil dan sedang seperti pompong, sampan, dan perahu (BPS Kota Dumai, 2019). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2018), produksi perikanan tangkap Kota Dumai mencapai 945,17 ton di tahun 2017. Di sisi lain, data BPS Kota Dumai (2021) mencatat bahwa total produksi perikanan tangkap laut di Kota Dumai sebesar 650,88 ton di tahun 2019.

Banyak faktor yang memengaruhi penurunan hasil tangkapan tersebut, salah satunya kondisi perairan Kota Dumai yang kurang kondusif untuk aktivitas penangkapan ikan. Kondisi tersebut ditandai adanya penetapan beberapa wilayah pesisir seperti Pelintung dan Lubuk Gaung sebagai kawasan industri, dan ditambah puluhan kapal besar yang lalu-lalang bersandar di Pelabuhan Dumai berdampak adanya potensi penurunan kualitas perairan Selat Rupat (Sarianto, Ikhsan, & Djunaidi, 2019).

Di Kota Dumai, terdapat 26 kelompok nelayan dengan total 884 orang yang sudah terdata dengan profesi sebagai nelayan. Melihat kondisi perairan Dumai saat ini, rata-rata nelayan sekarang harus melaut ke pulau-pulau terdekat yang masih terdapat banyak ikan dengan jarak tempuh yang cukup menyita waktu. KUB (Kelompok Usaha Bersama) Nelayan Tuna merupakan satu-satunya kelompok nelayan di Kecamatan Dumai Timur, tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas dan telah terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai. Kelompok tersebut menjadi salah

satu yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Selain jarak tempuh yang cukup jauh, Kelompok Nelayan Tuna juga dihadapkan pada persoalan lain, baik dari segi keamanan aktivitas di laut maupun kapasitas SDM Kelompok dalam hal teknologi penangkapan ikan.

Merespons kondisi tersebut, PT Pertamina RU II Dumai melalui unit kerja *Communication, Relations, & CSR* berupaya menginisiasi program pemberdayaan masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Nelayan Tuna. PT Pertamina RU II Dumai yang wilayah operasinya bersinggungan langsung dengan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas memiliki kepedulian sosial dengan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) kepada masyarakat sekitar. Adapun program CSR yang diinisiasi perusahaan yakni Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi. Secara umum, program tersebut masuk dalam Pilar Pertamina Berdikari dengan jenis *Community Empowerment*. Demikian, program tersebut dapat dikatakan sejalan dengan kebijakan CSR yang ada di internal PT Pertamina RU II Dumai (PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, 2019).

Munculnya Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi bukan tanpa alasan. Selain sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan dan tersedianya kebijakan CSR internal, PT Pertamina RU II Dumai tengah melaksanakan kepatuhan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 2007) dan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) (Kementerian BUMN RI, 2017). Apa yang dilakukan PT Pertamina RU II Dumai tersebut senada dengan konsep yang dikemukakan Carroll

(Puspita, et al., 2019) yakni kepatuhan terhadap peraturan (*obey the law*). Terlebih adanya skema Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014).

Dalam melaksanakan program CSR, PT Pertamina RU II Dumai mendelegasikan proses perencanaan, implementasi, *monitoring*, hingga evaluasi kepada unit kerja *Communication, Relations, & CSR* (PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, 2019) melalui Tim CSR. Guna mendukung dan mewujudkan pluralisme kesejahteraan (*welfare pluralism*), PT Pertamina RU II Dumai sebagai inisiator program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menggandeng *stakeholder-stakeholder* terkait. Pada konsep tersebut setidaknya ada 4 unsur yang terlibat, antara lain: pihak dari negara (pemerintah), entitas bisnis, lembaga non pemerintah, dan masyarakat (Sufa, 2019). Selain konsep pluralisme kesejahteraan, dewasa ini sering disebutkan adanya model *penta helix* sebagai salah satu model kekuatan dalam proses pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan yang menitikberatkan pada kolaborasi peran multiaktor, di antaranya: *Academic, Business Sector, Community, Government*, dan *Media* atau biasa disingkat ABCGM (Yunas, 2019).

Kolaborasi dengan model *penta helix* dapat ditemukan pada praktik-praktik CSR. Program Patratra menjadi salah satu program CSR dari PT Pertamina RU III Plaju yang menerapkan pendekatan *penta helix*. Pendekatan *penta helix* terlihat dengan munculnya peran-peran signifikan aktor-aktor dalam mendukung keberlanjutan program (Aditya, 2019). Studi tersebut menunjukkan bahwa model *penta helix* dapat muncul dan diimplementasikan pada praktik CSR

dalam konteks pengembangan masyarakat.

Jika didasarkan pada fungsi manajemen, maka tata kelola program CSR tidak terlepas dari adanya tahap awal yang dinamakan perencanaan (*planning*). Dinamika dalam proses perencanaan setiap program memiliki kekhasan masing-masing. Kemunculan pendekatan *penta helix* pada proses perencanaan menjadi salah satu dinamika yang dapat ditemui. Dengan catatan, pendekatan *penta helix* pada tahap perencanaan memerlukan komitmen kerja sama antar *stakeholder* terkait (Widowati, Ginaya, & Triyuni, 2019). Sumartono & Hermawan (2020_ berpendapat pentingnya penerapan model *penta helix* yakni dapat mengurangi faktor-faktor yang sekiranya dapat menghambat proses pengembangan. Penggunaan pendekatan *penta helix* dapat berupa pembukaan ruang koordinasi, diskusi hingga konsultasi, mendorong terciptanya inovasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Sumartono & Hermawan, 2020).

Berdasarkan pemaparan isu yang melatarbelakangi gagasan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi. Maka dari itu muncul pertanyaan penelitian, sebagai berikut: (1) Bagaimana proses perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi; dan (2) Bagaimana peranan masing-masing *stakeholder* dalam proses perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut melalui deskripsi peran dari masing-masing *stakeholder* dalam perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi.

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi

Istilah implementasi merupakan kata serapan dari *implementation* berarti sebuah perbuatan yang telah disepakati untuk dimulai atau digunakan (Oxford University Press, n.d.). Wahab (dalam Yulianti, 2018) mendefinisikan implementasi sebagai perihal yang dilakukan agar terjadi suatu dampak. Selain itu, Tarmizi Yussa (dalam Wedayanti, 2017) menjelaskan implementasi berupa serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah diusulkan. Dengan demikian, implementasi dapat diartikan sebagai tindakan yang memiliki dampak dan terarah pada suatu tujuan. Dalam konteks penelitian ini, perihal implementasi dilihat pada kerangka model *penta helix* yang fokus pada tahapan perencanaan suatu program CSR.

Konsep Model Penta Helix

Model *penta helix* muncul dari adanya susunan dua kata, yakni *penta* yang berarti lima dan *helix* yang berarti jaringan (Ortiz, 2016; Rufaidah, 2014 dalam Sumartono, S., & Hermawan, H., 2020). Lalu, model *penta helix* merujuk pada syarat adanya 5 unsur sebagai aktor kunci pembangunan, di antaranya: *Academic*, *Business Sector*, *Community*, *Government*, dan *Media* atau biasa dikenal model ABCGM. Model tersebut merupakan perkembangan dari konsep sebelumnya, mulai dengan nama *triple helix* (*Academic*, *Business Sector*, dan *Government*), lalu menjadi *quadruple helix* dengan tambahan unsur *Civil Society* (atau *Community*), hingga terakhir yang disebut *penta helix* dengan memasukkan unsur *Media* (Yunas, 2019).

Sebuah penelitian tidak lepas dari tantangan terkait deskripsi kebaruan

(*novelty*). Kebaruan dapat diperoleh dengan membandingkan perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis terdahulu. Peneliti menggunakan tiga artikel jurnal sebagai perbandingan. *Pertama*, penelitian kualitatif deskriptif dari Aliya, F. N., & Febriyani, A. R. (2020) yang membahas elemen ABCGM yang ada di Kota Semarang dalam mempertahankan identitas kota. *Kedua*, penelitian dari Yunas, N. S. (2019) yang mendeskripsikan model inovasi pengembangan potensi 3 desa di Provinsi Jawa Timur secara kualitatif deskriptif. *Ketiga*, penelitian kualitatif dari Aditya, R. (2019) yang menelaah keberlanjutan Program CSR Patratura yang diinisiasi PT Pertamina RU III Plaju. Penelitian kualitatif tersebut memilih pengelola program dan perwakilan perusahaan sebagai informan untuk mendapat keterangan yang selanjutnya dianalisis dengan konsep *penta helix*. Secara umum, penelitian tentang analisis peran *stakeholder* pada proses perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi di PT Pertamina RU II Dumai terbilang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dengan kata lain, penelitian ini memenuhi unsur kebaruan pada khazanah kajian *penta helix*, khususnya pada unsur fokus dan lokasi penelitian.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2020. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan proses yang terjadi pada perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi. Selain itu, penelitian ini menggunakan 2 jenis data. *Pertama*, data primer yang diperoleh melalui wawancara, *focus group discussion*, dan observasi. *Kedua*,

data sekunder yang didapatkan dari studi dokumentasi dan kajian pustaka, baik berupa artikel penelitian sebelumnya maupun kajian teori pendukung. Adapun dalam pengumpulan data dengan wawancara, informan dipilih dengan teknik *purposive*, yakni informan dipilih atas kesesuaian dengan masalah yang diteliti (Bungin, 2007 dalam Santosa, E. [ed.], 2018). Sehingga informan pada penelitian ini adalah Tim CSR Pertamina RU II Dumai selaku pemrakarsa program, dan Kelompok Nelayan Tuna selaku penerima manfaat. Data penelitian dianalisis dengan tahap-tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Kelompok Nelayan Tuna

Kelompok Nelayan Tuna merupakan salah satu pelaku perikanan di Kota Dumai. Kelompok ini terbentuk pada tanggal 12 November 2012 melalui musyawarah bersama anggota dan telah memiliki legalitas resmi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dengan nomor SK. 523/376/DISKAN. Nama Kelompok Nelayan Tuna diambil dari kesepakatan bersama pada musyawarah pembentukan kelompok. Pemilihan kata "TUNA" memiliki arti tersendiri, kata tuna merupakan singkatan dari "Tanjung Palas Utuh Nelayan Asli". Tanjung Palas adalah nama Kelurahan tempat mereka tinggal, kemudian kata "Utuh" yang dimaksud adalah pekerjaan nelayan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak terputus sampai saat ini. Jadi, pekerjaan anggota kelompok nelayan tuna ini benar-benar ada, asli, dan turun-temurun sampai sekarang di Kelurahan Tanjung Palas. Selain itu, alasan lain pemilihan kata tuna

yakni mudah diucapkan, meskipun para anggota mengetahui bahwa perairan Riau, khususnya Selat Rupat tidak ditemukan keberadaan ikan Tuna. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan, karena penggunaan kata TUNA memiliki filosofi tersendiri bagi mereka.

"Tuna itu artinya Tanjung Palas Utuh Nelayan Asli. Tanjung Palas nama kelurahan sini, Utuh tu artinya ada, orang tua dulu kan utuh tu tetap ada. Berarti nelayan ini bukan nelayan baru, isitilahnya turun - temurun dari datuk, bapak itu lah sampai sekarang." (H, Ketua Kelompok Nelayan Tuna, 23 Maret 2020)

Sekretariat Kelompok Nelayan Tuna terletak di Jalan Bandes, RT 002, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur bersamaan dengan rumah ketua kelompok. Hingga tahun 2019, kelompok ini memiliki 14 anggota dengan komposisi kepengurusan, sebagai berikut: 3 orang menjadi pengurus inti yakni ketua, sekretaris, bendahara dan selebihnya anggota. Mayoritas anggota kelompok menetap di RT 002, khususnya sekitar Jalan Bandes. Di antara anggota kelompok nelayan tersebut masih memiliki ikatan keluarga satu dengan lainnya. Pekerjaan nelayan dipilih karena mewarisi para pendahulu mereka. Di samping itu, kondisi wilayah RT 002 memiliki aliran sungai menuju Selat Rupat, yakni Sungai Parit Paman yang mendukung akses aktivitas pekerjaan mereka.

Jangkauan aktivitas penangkapan ikan Kelompok Nelayan Tuna mencapai pulau seberang, seperti di perairan Pulau Rupat, Pulau Babi, Teluk Dalam, Tanjung Leban, Selat Panjang, Merbau, dan sekitarnya. Untuk mencapai lokasi tersebut, para nelayan membutuhkan waktu 4 sampai 6 jam perjalanan. Hal tersebut dipilih karena Perairan Dumai bukan termasuk area tangkap ikan. Dalam

sekali keberangkatan, satu perahu rata-rata berkapasitas 2-3 ton dan biasanya diisi 1 hingga 3 awak, tergantung kebijakan masing-masing pemilik kapal. Dari 14 anggota, 9 orang memiliki kapal pribadi dan sisanya sebagai awak kapal.

Dalam proses penangkapan ikan, terdapat 2 jenis alat tangkap yang digunakan anggota Kelompok Nelayan Tuna, yakni jaring dan rawai senggol. Umumnya, hasil tangkapan dengan rawai senggol adalah ikan pari. Meskipun terkadang ikan-ikan lain juga tersangkut seperti kakap sisik, malung, hiu, dan sebagainya. Di sisi lain, hasil tangkapan yang diperoleh melalui jaring lebih bervariasi mulai dari udang, ikan senangin, bawal laut, hiu kecil, gembung, dan ikan-ikan kecil lainnya.

Pada segi ekonomi, nelayan biasanya mendapat hasil tangkapan ikan berkisar antara 100-200 kg dalam sekali melaut. Terdapat 2 tempat penjualan hasil tangkapan nelayan. Penjualan ikan oleh anggota yang menggunakan alat tangkap rawai senggol di Tanjung Medang, Pulau Rupat. Sedangkan anggota yang menggunakan jaring dijual ke TPI Dumai. Ikan hasil tangkapan memiliki harga yang bervariasi. Saat ini, ikan pari dihargai dengan Rp20.000,00-Rp32.000,00/kg, udang dihargai Rp60.000,00-Rp80.000,00/kg, ikan hiu dihargai Rp15.000,00/kg. Secara keseluruhan, rata-rata penghasilan dalam satu minggu melaut tersebut adalah Rp5.000.000,00-Rp10.000.000,00. Akan tetapi, hasil tersebut masih dikurangi dengan biaya operasional dan pembagian secara merata kepada jumlah awak dalam satu kapal.

“Pembagian hasil sama rata, misal satu kapal 3 awak, total penjualan di bagi 4, tiga awak dan satu yang punya kapal. Ya untuk perawatan kapal.” (H, Ketua Kelompok Nelayan Tuna, 23 Maret 2020)

Nelayan biasanya mengeluarkan biaya operasional sekitar Rp1.500.000,00 dalam sekali perjalanan. Jumlah tersebut digunakan untuk persediaan makan dan bahan bakar kapal. Sehingga setelah dikurangi biaya operasional dan dibagi rata awak kapal, rata-rata nelayan mendapatkan Rp1.000.000,00-Rp2.000.000,00. Meskipun demikian, hal tersebut juga tidak bisa dijadikan acuan. Faktor alam juga memberi pengaruh pada penghasilan nelayan, seperti keadaan pasang-surut air laut dan cuaca.

Kondisi tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok nelayan tuna, yakni rata-rata menengah ke bawah. Keterbatasan dana, sarana-prasarana, dan akses bantuan menjadi permasalahan yang dihadapi nelayan. Ditambah lagi, minimnya pemahaman akan teknologi baru dalam penangkapan ikan membuat kondisi nelayan belum bisa beranjak dari himpitan ekonomi yang tidak stabil. Upaya mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan nelayan sudah dilakukan ke berbagai instansi di Kota Dumai. Upaya tersebut berbuah manis dengan adanya respons positif dari PT Pertamina RU II Dumai. Dalam rencananya, PT Pertamina RU II Dumai akan membuat program kepada Kelompok Nelayan Tuna, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas kelompok melalui pemberian bantuan alat *fish finder* beserta pelatihan dan pendampingan dalam penggunaannya. *Fishfinder* adalah alat elektronik yang terdapat di kapal yang digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Prinsip kerja *“Fishfinder”* sama dengan *“echosounder”* yaitu mengukur kedalaman laut berdasarkan pulsa getaran suara. Getaran pulsa tersebut dipancarkan *“transducer”* kapal secara vertikal ke dasar laut, selanjutnya permukaan dasar laut akan

memantulkan kembali pulsa tersebut, kemudian diterima oleh “*transducer*” kapal (Suariyoto, 2002). Hasilnya nelayan dapat membaca topografi laut, kedalaman laut, hingga titik keberadaan ikan dilayar *fish finder*.

Menurunnya hasil tangkapan ikan dibandingkan dengan kurun waktu 3-5 tahun yang lalu merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi kelompok. Faktor non-alam penyebabnya seperti keterbatasan sarana prasarana, rusaknya alat tangkap karena tersangkut karang dan benda-benda lainnya, minimnya pengetahuan penggunaan teknologi baru dalam penangkapan ikan, dan tidak dapat dipungkiri karena semakin banyak orang yang mencari ikan dalam skala besar, juga kalah dalam muatan kapal.

“*Ya sekarang ini taulah orang cari ikan sudah banyak, tiap hari, pakai kapal-kapal besar muatan sekitar 10 ton sudah banyak. Kalau kami ni cuma 2 ton. Tapi namanya rezeki adalah yang ngatur.*” (Z, Anggota Kelompok, 19 Maret 2020).

Proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh kelompok masih menggunakan naluri dan perhitungan alam mewarisi orang tua mereka. Harapan dalam program ini, penggunaan *fish finder* dapat membantu kelompok mendeteksi posisi ikan sehingga terdapat peningkatan hasil tangkapan ikan dan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi mereka.

Proses Perencanaan Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan berbasis Teknologi pada Kelompok Nelayan Tuna

Tahun 2018, PT Pertamina RU II Dumai menjalin kerja sama dengan *Social Development Studies Center (SODEC UGM)* untuk melakukan studi pemetaan sosial di wilayah pengembangan masyarakat perusahaan. Studi pemetaan sosial menjadi salah satu acuan dalam merencanakan

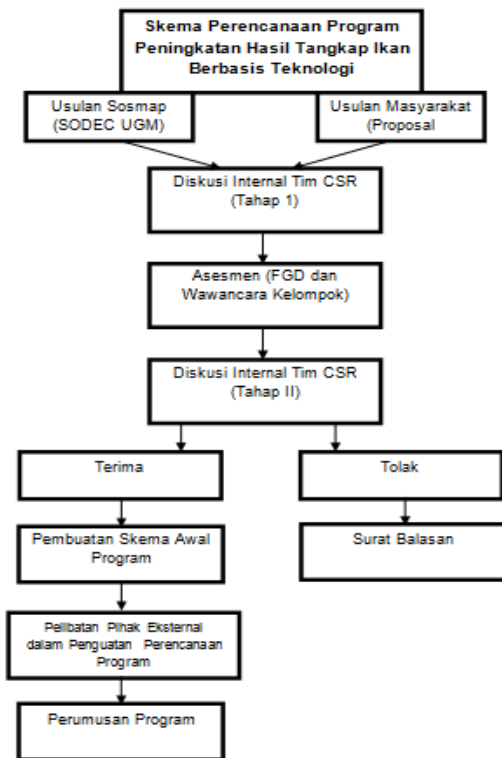
program pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya memotret permasalahan dan potensi suatu wilayah. Hasil dari studi pemetaan sosial tersebut salah satunya memuat rekomendasi program berkaitan dengan penguatan kapasitas modal nelayan tangkap, yakni pada Kelompok Nelayan Tuna di Kelurahan Tanjung Palas yang menjadi salah satu wilayah pengembangan masyarakat PT Pertamina RU II Dumai.

Sebagai bentuk kepatuhan akan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, PT Pertamina RU II Dumai melalui Tim CSR melakukan asesmen terhadap kelompok setelah menimbang rekomendasi dari studi pemetaan sosial. Asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana permasalahan dan potensi yang ada pada kelompok. Selain hasil rekomendasi dari studi pemetaan sosial, usulan dari masyarakat dalam bentuk proposal yang telah diajukan oleh kelompok nelayan tuna juga turut menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan program. Asesmen dilakukan dengan penggalan data melalui *Focus Group Discussion (FGD)* bersama seluruh anggota kelompok, serta wawancara langsung beberapa anggota yang dilakukan oleh *Community Development Officer (CDO)* perusahaan untuk mendapatkan gambaran terkait kelompok.

Potensi dan permasalahan yang sudah tergambar menjadi bahan diskusi internal tim CSR untuk dianalisis lebih mendalam, sekaligus menentukan perihal kepastian pembinaan kelompok. Setelah melalui proses diskusi di internal tim CSR, didapati keputusan bahwasanya Kelompok Nelayan Tuna akan dibina lebih lanjut. Proposal yang diajukan oleh

kelompok diterima dan dikirim surat balasan oleh CSR Pertamina RU II Dumai terkait akan dilakukannya pembinaan melalui program pemberdayaan terhadap Kelompok Nelayan Tuna.

Gambar 1.
Skema Perencanaan Program Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi



Selanjutnya, Tim CSR Pertamina RU II Dumai membuat skema awal sederhana terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan mempelajari ulang proposal yang diajukan kelompok, hasil *social mapping*, dan hasil temuan dari FGD awal bersama kelompok. Setelah skema dirumuskan dalam sebuah *roadmap* program, Tim CSR melibatkan Dinas Perikanan dan Kelompok Nelayan Tuna untuk mendiskusikan *roadmap* sekaligus dalam rangka memperkuat perencanaan program. Diskusi tersebut dilakukan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 di Kantor Dinas Perikanan.

Gambar 2.
Foto Diskusi Tim CSR dengan Dinas Perikanan dan Kelompok



Salah satu hasil diskusi tersebut menyepakati suatu program pelatihan yang belum pernah diselenggarakan di Kota Dumai bagi kelompok nelayan, yakni pelatihan penggunaan *fish finder*. Sebelumnya, Dinas Perikanan Dumai sudah memiliki rencana untuk menyelenggarakan pelatihan serupa, akan tetapi karena keterbatasan anggaran akhirnya ditunda. CSR Pertamina RU II Dumai menangkap hal tersebut sebagai sebuah peluang, yakni membantu instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas nelayan tangkap dalam hal penggunaan teknologi *fish finder*. Atas dasar tersebut, akhirnya muncul nama program “Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi Melalui Penggunaan *Fish Finder*”.

Program peningkatan hasil tangkap ikan berbasis teknologi hadir dalam rangka menjawab permasalahan kelompok nelayan tuna. Sejauh ini, kelompok belum mengenal *fish finder*, proses pencarian ikan masih dilakukan secara tradisional. Di samping kurang efektif dalam segi waktu, terkadang hasil tangkapan juga kurang maksimal. Harapannya, program ini dapat memberi pengetahuan baru terkait penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan bagi kelompok, meminimalisasi kerugian waktu, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan hasil tangkapan. Selain Dinas Perikanan dan Kelompok Nelayan,

pihak eksternal yang dilibatkan oleh CSR Pertamina RU II Dumai yakni Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Dumai, Pemerintah Kelurahan Tanjung Palas, dan Media Lokal.

Analisis Penta Helix dalam Melihat Peran Aktor dalam Program CSR Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi

Penta Helix digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat proses perencanaan program peningkatan hasil tangkap ikan berbasis teknologi. Indikator yang dilihat dalam analisis *penta helix* yakni pelibatan lima aktor atau yang sering dikenal dengan istilah ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, Media*). Masing-masing *stakeholder* dianalisis satu persatu berkaitan dengan peranan dalam proses perencanaan, kelima *stakeholder* tersebut sebagai berikut:

Peran Aktor Academic

Akademisi menjadi salah satu *stakeholder* yang dilibatkan PT Pertamina RU II Dumai dalam perencanaan program, yakni melalui studi pemetaan sosial untuk mendapatkan informasi yang objektif mengenai kondisi masyarakat di wilayah pengembangan. Tahun 2018, PT Pertamina RU II Dumai bekerja sama dengan SODEC UGM untuk melakukan studi pemetaan sosial di wilayah pengembangan masyarakat. Salah satu dari tujuan pemetaan tersebut untuk mendapatkan rekomendasi program CSR yang sesuai dengan potensi dan permasalahan di masyarakat. Hasil dari studi tersebut memuat salah satu rekomendasi program, yakni penguatan kapasitas nelayan tangkap di Kelurahan Tanjung Palas. Berangkat dari hal itu, tim CSR Pertamina RU II Dumai melakukan analisis lebih mendalam terkait dengan kelompok nelayan yang dimaksudkan. Setelah

melalui diskusi internal dan melibatkan *stakeholder* lain, muncul rencana program "Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi Melalui Penggunaan *Fish Finder*".

Di sisi lain, proses perencanaan kegiatan yang bersifat teknis dilakukan dengan menggandeng Politeknik Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Politeknik berperan sebagai konseptor mengenai persiapan peralatan pendukung dalam program. Selain itu, Politeknik juga menjadi narasumber dalam pelatihan nantinya. Pelibatan akademisi saat ini mulai marak dalam proses perencanaan program, tidak jarang inovasi program terkadang lahir dari ide akademisi. Dengan demikian, pelibatan akademisi sangat membantu perusahaan dalam mendesain program pemberdayaan.

Peran Aktor Sektor Bisnis

PT Pertamina RU II Dumai selaku entitas bisnis mempunyai peran yang cukup strategis dalam program ini, yakni sebagai pemrakarsa program. Selain itu, perusahaan juga berinisiatif melibatkan lintas *stakeholder* mulai dari perencanaan program. Dalam hal ini perusahaan berperan sebagai *leading sector*, yakni penggerak bagi sektor lainnya dalam perencanaan program Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi Melalui Penggunaan *Fish Finder*. Perusahaan menugaskan Tim CSR yang berperan melakukan pendekatan dan asesmen terhadap kelompok, menjalin kerja sama dengan lintas sektor, sekaligus nantinya menjadi pelaksana dan *evaluator* program. Sinergi lintas *stakeholder* yang digagas perusahaan bisa menjadi referensi baru bagi *stakeholder* lain dalam merencanakan suatu program pemberdayaan.

Peran Aktor Komunitas

Kelompok Nelayan Tuna selaku penerima manfaat dalam program juga ambil bagian dalam proses perencanaan. Pemberian masukan dalam *FGD* dan wawancara yang telah dilakukan, serta *sharing* permasalahan dan kendala yang dihadapi para nelayan cukup membantu perusahaan dalam merumuskan program. Ke depannya, kelompok inilah yang diharapkan akan menjadi percontohan bagi kelompok lain. Kelompok bisa turut membantu pemerintah dengan menjadi narasumber untuk *sharing knowledge* terkait penggunaan *fish finder* kepada kelompok lain di Kota Dumai jika suatu saat dibutuhkan.

Peran Aktor Pemerintah

Tim CSR Pertamina RU II Dumai beberapa kali melakukan diskusi dengan Dinas Perikanan untuk merencanakan program. Dinas Perikanan merupakan instansi yang memayungi kelompok nelayan tuna, legalitas kelompok nelayan tuna dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan sudah terdaftar hingga kementerian pusat. Setidaknya Dinas Perikanan sudah mengetahui seluk-beluk kelompok, baik dari potensi maupun permasalahan yang dihadapi. Peran serta dinas dalam membantu Kelompok Nelayan Tuna juga banyak, mulai dari bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung pekerjaan nelayan, hingga pendampingan oleh tenaga penyuluh. Hal tersebut yang menjadi faktor pelibatan Dinas Perikanan dalam proses perencanaan program CSR perusahaan.

Melalui diskusi baik perseorangan ataupun saat *FGD*, Dinas memberikan banyak masukan terkait program pemberdayaan yang akan dilakukan kepada Kelompok Nelayan Tuna. Dinas Perikanan mengapresiasi dan sangat setuju

dengan program yang akan dilaksanakan oleh CSR Pertamina RU II Dumai. Program tersebut dinilai sangat inovatif dengan mengenalkan teknologi baru dalam membantu penangkapan ikan, juga baru akan diadakan untuk pertama kalinya di Dumai. Sempat ada rencana dari Dinas untuk menyelenggarakan program serupa tahun 2020, akan tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga harus ditunda. Selain itu, dua tenaga penyuluh lapangan dari Dinas Perikanan untuk Kelompok Nelayan Tuna juga akan dikerahkan untuk terlibat dalam program mulai dari pelatihan, hingga ke depannya turut melakukan monitor hasil tangkapan ikan setelah menggunakan *fish finder*.

Dukungan langsung juga diberikan oleh pemerintah Kelurahan Tanjung Palas dalam bentuk dorongan pengajuan permohonan bantuan kepada perusahaan, yakni dengan turut menandatangani proposal permohonan bantuan dari kelompok. Selain itu, pihak kelurahan juga selektif dalam menerima proposal dari masyarakat sebelum diajukan kepada perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen dan kebenaran dari yang bersangkutan. Pihak kelurahan juga turut memberikan akses peminjaman fasilitas aula untuk kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang akan dilakukan, dan berencana akan membantu melakukan monitor kegiatan supaya berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi kelompok.

Peran Aktor Media

Media lokal turut ambil peran dalam publikasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Muatan pesan terkait program diharapkan sampai kepada berbagai *stakeholder*, dan menjadi tambahan informasi seputar kegiatan pemberdayaan

kelompok nelayan khususnya yang dilakukan oleh CSR Perusahaan. Kemudian, inovasi pemanfaatan teknologi dalam program ini diharapkan juga bisa tersebar luas di masyarakat, khususnya kelompok nelayan di Kota Dumai, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi mereka.

Kegiatan pengenalan teknologi *fish finder* dalam penangkapan ikan ini dilaksanakan kepada Kelompok Nelayan Tuna. Sehingga, hasil publikasi nantinya diharapkan dapat memicu ketertarikan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta untuk mengadakan program serupa dengan sasaran kelompok lain. Dengan demikian, setiap lembaga akan dapat sama-sama berkontribusi untuk pengembangan masyarakat di Kota Dumai, khususnya kepada kelompok nelayan. Kemudian, model perencanaan yang dilakukan Pertamina RU II Dumai dengan melibatkan lintas sektor juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder* lain dalam merencanakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Program CSR diarahkan untuk menjawab permasalahan dan membawa dampak positif bagi penerima manfaat. Pelibatan lintas *stakeholder* dalam perencanaan program menjadi salah satu upaya mendesain program agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Proses perencanaan Program Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Berbasis Teknologi yang diinisiasi oleh CSR Pertamina RU II Dumai secara keseluruhan terstruktur dengan baik. Skema perumusan program dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilalui. Setidaknya ada 7 tahapan dalam perencanaan program CSR tersebut, di antaranya; 1) Pertimbangan rekomendasi

program dari akademisi dan proposal yang diajukan oleh masyarakat (kelompok); 2) Diskusi internal Tim CSR tahap 1; 3) Asesmen terhadap kelompok sasaran (FGD dan Wawancara); 4) Diskusi Tim CSR tahap 2 (Terima atau Tolak); 5) Pembuatan skema awal program oleh Tim CSR; 6) Pelibatan *stakeholder* eksternal dalam penguatan perencanaan program; dan 7) Perumusan program.

Implementasi model *penta helix* dalam perencanaan program terlihat dari peranan masing-masing aktor. Secara keseluruhan pelibatan lintas sektor dalam proses perencanaan program berjalan dengan baik. Setiap aktor mempunyai peran tersendiri, di antaranya: 1) CSR PT Pertamina RU II sebagai pemrakarsa program, 2) Dinas Perikanan sebagai pemberi masukan dan pendampingan, juga Pemerintah Kelurahan yang selalu memberikan dukungan, 3) Politeknik sebagai konseptor pelaksanaan kegiatan yang sifatnya teknis, 4) Kelompok selaku penerima manfaat dan pemberi masukan, dan 5) Media dengan peran mempublikasikan segala bentuk kegiatan dalam program mulai dari proses perencanaan hingga implementasi nantinya.

Jadi, proses perencanaan dalam program ini dapat dikatakan sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam konsep *penta helix*, yakni dengan adanya pelibatan lintas sektor yang mempunyai peranan masing-masing. Skema perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka agar program tepat sasaran dan membawa dampak yang positif bagi Kelompok Nelayan Tuna dengan menjawab permasalahan yang dihadapi.

Saran ke depan lebih kepada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan program, di antaranya: *Pertama*, perlunya diadakan pelatihan perawatan alat *fish finder* di

samping pelatihan penggunaan. Harapannya, alat tersebut terawat dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.

Kedua, perlu dilakukan proses pendampingan sekaligus untuk *monitoring* hasil tangkapan ikan secara berkala 1-2 bulan sekali, untuk mendapatkan data hasil tangkapan nelayan dan juga solusi ketika terjadi kendala. Proses pendampingan bisa dengan melibatkan lintas *stakeholder* yang terlibat seperti Pemerintah Kelurahan Tanjung Palas, Penyuluh Dinas Perikanan, Perwakilan Politeknik Kelautan dan Perikanan, serta Tim CSR Pertamina RU II.

Ketiga, pengembangan program melalui pelatihan serupa, atau dengan teknologi yang lebih canggih untuk membantu dalam kegiatan penangkapan ikan terhadap kelompok-kelompok lain di Kota Dumai. Dalam hal ini Kelompok Nelayan Tuna bisa dijadikan sebagai narasumber agar turut berperan dalam proses pengembangan kapasitas nelayan di Kota Dumai.

Daftar Pustaka

- Aditya, R. (2019). Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratura pada Tahun 2017. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 149-164.
- Aliya, F. N., & Febriyani, A. R. (2020). Komunikasi Pengembangan untuk Identitas Tempat: Budaya Kampung di Kota Semarang. *Jurnal KMP (Jurnal Komunikasi Pembangunan)*, 18(01).
- BPS Kota Dumai. (2019). *Statistik Daerah Kota Dumai 2019*. Dumai: BPS Kota Dumai.
- BPS Kota Dumai. (2021). *Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Kecamatan di Kota Dumai (ton), 2018-2019*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Dumai: <https://dumaikota.bps.go.id/dynami-ctable/2020/07/08/97/produksi-perikanan-tangkap-laut-menurut-kecamatan-di-kota-dumai-ton-2018-2019.html>
- Kementerian BUMN RI. (2017). *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2018). *Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. (2014). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup RI.
- Oxford University Press. (n.d.). *Definition of implementation noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Retrieved Januari 4, 2023, from Oxford Learner's Dictionaries: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/implementation?q=implementation>
- PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai. (2019). *Dokumen Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai 2019*. Dumai: PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai.
- PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai. (2019). *Dokumen Struktur Organisasi Pelaksanaan Program*

- Pemberdayaan Masyarakat Corporate Social Responsibility PT Pertamina Refinery Unit II Dumai Tahun 2019*. Dumai: PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai.
- Puspita, A. R., Barasani, A. A., Aditya, R., A, W., Puspitasari, I., & Sari, R. K. (2019). Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Perserto) RU III Plaju. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 29-45.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Santosa, E. (Ed.). (2018). *Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Komunikasi, Organisasi, Budaya & Politik*. Purwokerto: FISIP Universitas Jenderal Soedirman.
- Sarianto, D., Ikhsan, S. A., & Djunaidi, D. (2019). Sebaran Daerah Penangkapan Alat Tangkap Sondong di Selat Rupa Perairan Kota Dumai. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*, 14(1).
- Suariyoto, Y. (2002). *Pengetahuan Dasar Echosounder dan Aplikasinya Pada Kapal Ikan*. Semarang: Departemen Kelautan dan Perikanan. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI).
- Sufa, R. F. (2019). *Berkah Samudera Sang Juara Pantura*. Semarang: CV Tigamedia Pratama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartono, S., & Hermawan, H. (2020). he Reform of Public Service Bureaucracy in the Investment Sector Within the Pentahelix Perspective: A New Hope in the Era of Autonomy? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1), 33-45.
- Wedayanti, M. D. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 154-167. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1743>
- Widowati, S., Ginaya, G., & Triyuni, N. N. (2019). Penta Helix Model to Develop Ecotourism: Empowering the Community for Economic and Ecological Sustainability. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 31-46.
- Yulianti, D. (2018). Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 20(1), 11-21.
- Yunas, N. S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 37-46.